

ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

Rah Adi Fahmi Ginanjar¹, Sugeng Setyadi², Umayatu Suiroh³

Rah Adi Fahmi Ginanjar, email: rah.adi@untirta.ac.id
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta

Sugeng Setyadi, email: sugengsetyadi@untirta.ac.id
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta

Umayatu Suiroh, email: suiroh.umayatu@gmail.com
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kemiskinan di Provinsi Banten dan mengidentifikasi wilayah-wilayah (kabupaten/kota) miskin serta permasalahannya dari berbagai sektor dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Analisis kebutuhan sarana prasarana berbagai sektor yang mendorong penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten juga menjadi tujuan penelitian ini. Serta, penelitian ini bertujuan untuk membuat desain arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun. Pemanfaatan alat analisis dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat dan menentukan sektor-sektor permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di wilayah (kabupaten/kota) Provinsi Banten. Selain itu, alat analisis dalam penelitian ini juga akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat dan atau harus ditingkatkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah terciptanya desain arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun. Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar secara akademis bagi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.

Kata kunci: Kemiskinan, Analisis SWOT.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan bagi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial-ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga tertinggal dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi kehidupan lebih baik.

Pembangunan sedemikian rupa yang terjadi pada Provinsi Banten, juga tetap belum sepenuhnya mampu mengeliminasi jumlah penduduk miskin. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nyatanya keadaan di Provinsi Banten masih terdapat penduduk miskin.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia 2017

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
Aceh	872,61
Sumatera Utara	1.453,87
Sumatera Barat	364,51
Riau	514,62
Jambi	286,55
Sumatera Selatan	1.086,92
Bengkulu	316,98
Lampung	1.131,73
Kep. Bangka Belitung	74,09
Kep. Riau	125,37
DKI Jakarta	389,69
Jawa Barat	4.168,44
Jawa Tengah	4.450,72
DI Yogyakarta	488,53
Jawa Timur	4.617,01
Banten	675,04
Bali	180,13
Nusa Tenggara Barat	793,78
Nusa Tenggara Timur	1.150,79
Kalimantan Barat	387,43
Kalimantan Tengah	139,16
Kalimantan Selatan	193,92
Kalimantan Timur	220,17
Kalimantan Utara	49,47
Sulawesi Utara	198,88
Sulawesi Tengah	417,87
Sulawesi Selatan	813,07
Sulawesi Tenggara	331,71
Gorontalo	205,37
Sulawesi Barat	149,76
Maluku	320,51
Maluku Utara	76,47
Papua Barat	228,38
Papua	897,69
Indonesia	27.771,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dilihat dari jumlah penduduk miskin dapat dinyatakan bahwa secara nasional kemiskinan di Provinsi Banten masih lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Banten dan Indonesia 2015-2017

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
	2015 (Smst. 1)	2015 (Smst. 2)	2016 (Smst. 1)	2016 (Smst. 2)	2017 (Smst. 1)
Banten	702,40	690,67	658,11	657,74	675,04
Indonesia	28.502,79	28.513,57	28.005,39	27.764,32	27.771,22

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara garis kemiskinan, Provinsi Banten memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Indonesia. Indikator garis kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Gais kemiskinan Provinsi Banten dan Indonesia dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Garis Kemiskinan Provinsi Banten dan Indonesia 2015-2017

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)				
	2015 (Smst. 1)	2015 (Smst. 2)	2016 (Smst. 1)	2016 (Smst. 2)	2017 (Smst. 1)
Banten	344.855	365.672	377.052	382.903	396.608
Indonesia	344.541	356.378	364.521	372.114	385.671

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan Provinsi masih lebih tinggi daripada garis kemiskinan Indonesia selama kurun waktu 2015-2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Banten adalah mereka yang memiliki pengeluaran dibawah garis kemiskinan Provinsi Banten. Jadi, beberapa masyarakat di Provinsi Banten yang berada di bawah garis kemiskinan Banten namun berada di atas garis kemiskinan Indonesia belum dapat dikategorikan miskin secara nasional. Namun, akan dikategorikan miskin ketika berada di bawah garis kemiskinan Banten dan di bawah garis kemiskinan Indonesia.

Jumlah angka kemiskinan di wilayah Provinsi Banten berdasarkan data BPS Tahun 2015 mencapai 690.670 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk Banten yang mencapai 11,95 juta jiwa dan persentase penduduk miskin mencapai 5,75%. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
Kab. Pandeglang	115.900	1.200.512	9,67
Kab. Tangerang	111.210	1.279.412	8,71
Kab. Serang	182.520	3.477.495	5,29
Kota Tangerang	67.920	1.484.502	4,58
Kota Cilegon	102.880	2.093.706	4,94
Kota Serang	14.900	418.705	3,57
Kota Tangerang Selatan	36.400	655.004	5,58
Banten	26.380	1.593.812	1,57

Sumber: Banten Dalam Angka, 2017

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tahun 2016 didominasi oleh Kabupaten Serang dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 182.520 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil terdapat pada Kota Serang dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 14.900 orang. Tingkat kemiskinan terbesar berada pada Kabupaten Pandeglang dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,67%. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada pada Kota Serang dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,57%.

Untuk menanggulangi kemiskinan dalam rencana jangka panjang Provinsi Banten menargetkan tingkat kemiskinan menurun hingga mencapai 5% pada tahun 2025. Untuk mencapai target angka kemiskinan tersebut dibutuhkan upaya sungguh-sungguh dan terencana serta terkoordinasi antara berbagai pihak. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang terintegrasi berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan.

Melihat hal tersebut di atas, maka penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin, dengan demikian diperlukan penelitian terkait penanggulangan kemiskinan ini.

TINJAUAN LITERATUR

a. Kemiskinan

Menurut Suparlan (1984) kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan menurut Todaro (2003) dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat faktor-faktor biologis, psikologis dan sosial (malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik, dll). Lingkungan fisik membuat orang sulit melakukan usaha atau bekerja. Sedangkan, kemiskinan struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai pertukaran (terms of trade) antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh penduduk miskin dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang harus dibelinya; ketidakadilan dalam pembayaran jasa-jasa pekerja (upah yang rendah dan eksploitasi pekerja); dan, pengenaan pungutan yang memberatkan dan relatif memeras penduduk miskin.

b. Teori kemiskinan

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (BAPPENAS dalam BPS, 2002).

Sebagai dasar untuk kebijakan pengentasan kemiskinan, memahami masalah kemiskinan seringkali menuntut adanya upaya pendefinisian, pengukuran dan pengidentifikasian akar-akar penyebab kemiskinan.

Sebenarnya sudah banyak terdapat berbagai kajian yang ditunjukkan untuk mengklasifikasikan orang miskin dan menganalisis penyebab kemiskinan, namun demikian upaya-upaya tersebut belum tuntas. Hal ini karena kemiskinan

multidimensi dan karena kemiskinan bersumber dari aneka kondisi (Sri Harijati Hatmadji, 2004)

Berdasarkan jumlah penduduk miskin akan berpotensi menciptakan permasalahan sosial yaitu menurunnya kuantitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial, politik serta meningkatnya angka kriminalitas. (M. Sabeth Abilawa, 2016). Seseorang dinyatakan miskin jika tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan dasarnya atau kebutuhan pokok untuk hidup, hal ini sering disebut dengan kemiskinan konsumsi atau kemiskinan material.

Tentu saja definisi kemiskinan yang hanya dilihat dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan konsumsi semata tidak menjadi memadai walaupun definisi ini berguna dan akan terus dipakai untuk mengukur kemajuan tingkat kesejahteraan. Bersamaan dengan bertambahnya perkembangan pengetahuan mengenai kemiskinan, didukung oleh sejumlah realitas dan faktor-faktor penentunya, sekitar tahun 1990-an pengertian kemiskinan mengalami pergeseran. Definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakmampuan dibidang kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Dari perluasan pengertian kemiskinan, nampak bahwa kemiskinan berwajah majemuk, berubah dari waktu ke waktu bahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan publik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, sesungguhnya dimensi kemiskinan yang memadai dan sesuai perkembangan harus mencakup berbagai dimensi tidak hanya berurusan dengan pemenuhan atau kesejahteraan materi tetapi juga berurusan dengan kesejahteraan sosial (Sri Harijati Hatmadji, 2004)

Menurut Teori Radikal, orang miskin tetap miskin karena memang dipelihara untuk miskin. Sistem ekonomi dan politik memaksa mereka berada dalam kondisi miskin. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi. Negara-negara atau daerah-daerah menjadi miskin karena direncanakan dan dibuat miskin. Kemiskinan lalu dianggap hanya sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dan karenanya sering penguasa hanya bagi-bagi duit dan barang (bantuan langsung tunai, pinjaman lunak, beras untuk orang miskin, operasi pasar murah, dan sejenisnya), padahal kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks, tidak sebatas kurang makan dan kurang pendapatan.

c. Vicious circle of poverty

Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) Ragnar Nurkse (1953) mengajarkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya seperti lingkaran yang tidak berujung. Fenomena kemiskinan struktural dan kultural semacam ini menggambarkan bagaimana penduduk miskin tetap menjadi miskin karena keadaan awal miskin, dan demikian terus berlaku secara terus-menerus. Penduduk miskin akan semakin terjatuh dalam "kubangan kemiskinan" karena mereka mendapatkan pinjaman uang dari pelepas uang atau perantara, yang menagih cicilan dan bunga tinggi (Achmadi, 2007).

Paul Rosenstein-Rodan (1943, 1957), Ragnar Nurkse (1953), and Gunnar Myrdal (1957) sangat terkenal dengan teorinya menentang model neo-klasik dalam perekonomian. Mereka beranggapan bahwa mekanisme pasar tidak dapat menanggulangi berbagai masalah dalam perekonomian, misalnya koordinasi atau distribusi pendapatan, sehingga menciptakan keterbelakangan ekonomi (*underdevelopment*). Intervensi negara, baik itu secara domestik maupun internasional, diperlukan untuk melakukan proses pembangunan. Dua argument yang secara jelas menggambarkan teorinya, yakni mengenai "*vicious cycle of poverty*" dan keuntungan investasi. Pertama, lingkaran belenggu kemiskinan hanya terjadi di negara berkembang (Nurkse, 1953).

Keinginan seseorang untuk menabung merupakan bagian dari fungsi pendapatan, apabila pendapatan yang diterima sangat rendah maka tingkat tabungan juga rendah. Ketika seseorang tidak memiliki cukup tabungan dari pendapatan mereka, maka investasi dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Pembangunan hanya dapat terjadi ketika pendanaan investasi datang dari luar negeri ke dalam perekonomian domestik. Kedua, bahwa keuntungan dari investasi tidak tinggal di negara penerima (*recipients*) tetapi kembali ke negara asal sehingga tidak mampu menciptakan efek pengganda dalam perekonomian. Suatu investasi pada suatu sektor tentu saja dipengaruhi oleh investasi di sektor lain, sehingga apabila suatu sektor tidak mampu berkembang maka akan menyebabkan sektor lain yang bersifat complementary tidak mampu berkembang pula.

d. Teori Konservatif

Menurut Teori Konservatif, kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, melainkan berasal dari karakteristik orang-orang miskin itu sendiri (misalnya malas, boros, tidak merencanakan kehidupannya, fatalis dan pasrah pada keadaan). Penduduk miskin mempunyai budaya miskin (*culture of poverty*). "Penyebab mereka miskin, karena mereka miskin. Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan (kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan)" (Nazamuddin, 2009). Kemiskinan merupakan masalah sosial dan kultural, sehingga penanggulangan kemiskinan harus melibatkan transformasi sosial dan kultural pula, termasuk perubahan nilai-nilai (misal etos kerja).

e. Teori Liberal

Teori Liberal menyatakan bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan akan segera ditinggalkan.

Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan besar terhadap upaya-upaya pembangunan. Kemiskinan merupakan faktor penghambat pembangunan, karena dengan adanya kemiskinan berarti terdapat ketergantungan. Ketergantungan tersebut yang kemudian menjadi beban pemerintah melalui alokasi anggaran pengentasan kemiskinan. Salah satu indikator umum yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu negara adalah tingkat kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*). Total *Poverty Gap* dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan minimal atau garis kemiskinan dengan pendapatan yang diperoleh penduduk miskin. Total *poverty gap* menunjukkan nilai total pendapatan suatu negara yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk dibawah garis kemiskinan menjadi diatas garis kemiskinan.

f. Jenis kemiskinan

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu kejadian. Bambang subagio et all (2001) menyatakan bahwa berdasarkan kajian-kajian dari data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 golongan. Pertama, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lainnya. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor non-alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lainnya. Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu absolut dan relatif, kultural dan struktural, lingkaran kemiskinan, statis dan dinamis, dan sementara serta kronis.

g. Ukuran kemiskianan

Menurut Sajogyo (1977) cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut adalah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi (kalori dan protein) dengan

mengungkapkan masalah garis kemiskinan dan tingkat pendapatan petani. Ada tiga golongan orang miskin yaitu golongan lapisan miskin yang mempunyai pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240-360 kg, dan lapisan paling miskin yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak kurang dari 240 kg. Bank Dunia dalam BPS (2000) menetapkan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya dibawah US \$ 2 per hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memberikan pemikiran untuk mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari. Badan ini mengusulkan bahwa setiap orang harus memenuhi 2100 kalori setiap harinya. Jadi, 2100 kalori ini merupakan batas garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS dengan memperhitungkan kebutuhan non pangan seperti kebutuhan perumahan, bahan bakar, penerangan listrik, pendapatan air bersih serta jasa-jasa. Kemudian kriteria-kriteria ini diubah dalam angka Rupiah. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS sendiri akan selalu mengalami penyesuaian, karena harga kebutuhan itu berubah (BPS)

h. Ciri-ciri kemiskinan

Menurut Sumedi dan Supadi (2004) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut 1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

i. Faktor penyebab kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (1997) yaitu: Pendidikan yang Terlampau Rendah; Malas Bekerja; Keterbatasan Sumber Alam; Terbatasnya Lapangan Kerja; Keterbatasan Modal; Beban Keluarga.

Menurut Kartasmita dalam Rahmawati (2006), kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu: Rendahnya Taraf Pendidikan; Rendahnya Derajat Kesehatan; Terbatasnya Lapangan Kerja; Kondisi Keterisolasian.

Menurut Suryadiningrat (2003), kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya : 1) keengganan bekerja dan berusaha, 2) kebodohan, 3) motivasi rendah, 4) tidak memiliki rencana jangka panjang, 5) budaya kemiskinan, dan 6) pemahaman keliru terhadap kemiskinan. Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat : 1) ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu dan 2) kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.

Nasikun dalam Suryawati (2005) menyoroiti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: Pelestarian Proses Kemiskinan; Pola Produksi Kolonial; Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam; Peminggiran Kaum Perempuan; Faktor Budaya dan Etnik.

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada tahap awal ada beberapa hal yang dilakukan dalam menyusun desain Masterplan Penanggulangan Kemiskinan yaitu meliputi studi literatur serta penyusunan alat-alat pengumpulan data dan desain survey. Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini menjadi bahan penyempurnaan desain penelitian dan pengumpulan data yang akan dilakukan.

Pada tahap berikutnya dilakukan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder berdasarkan desain penelitian dan desain survey yang telah disempurnakan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi yang telah dipublikasikan yang bersumber dari: Data BPS, data Laporan kegiatan SKPD Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Data Primer diperoleh langsung dari stakeholder penanggulangan kemiskinan yang diperoleh melalui Wawancara dengan Stakeholder (Tokoh Masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat Miskin).

Data yang dihasilkan pada tahap ini akan ditabulasi dilakukan analisis deskriptif untuk menghasilkan gambaran karakteristik potensi dan permasalahan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten. Pada tahap ini dilakukan

analisis data dari data primer maupun sekunder yang telah di tabulasi dan dideskripsikan.

3.2 Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah

Analisis Deskriptif kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro.

Analisis makro, dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro yang dilakukan. Analisis ini meliputi analisis terhadap RPJPN, RPJMN, dan kebijakan nasional lainnya dan RPJMD Propinsi Banten, RPJPD Provinsi Banten yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Analisis mikro, dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat mikro yang berkaitan dengan: (i) analisis penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial. (ii) analisis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. (iii) analisis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

3.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk memetakan permasalahan, potensi, peluang dan ancaman penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten sehingga dapat dirumuskan berbagai strategi dan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan.

3.4 Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Metode Analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity and Treath Analysis*) merupakan alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal, yang terdiri atas empat elemen berupa Kekuatan (*Strenght*) dan Kelemahan (*Weakness*) dalam lingkungan internal serta Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treath*) dalam lingkungan eksternal.

Kegiatan dalam rangka analisis lingkungan ini lazim disebut sebagai *environmental scanning*, yaitu kegiatan pengamatan kondisi lingkungan untuk mendapatkan gambaran yang tepat tentang diri dan lingkungan, khususnya yang menyangkut pengenalan atas berbagai elemen kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta elemen peluang dan ancaman yang dihadapinya.

Didasarkan pada pemahaman yang tepat atas elemen-elemen tersebut, maka kemudian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai isu strategis yang selanjutnya dapat dirumuskan bidang-bidang strategis yang dipandang penting untuk ditangani melalui penerapan berbagai strategi.

Analisis SWOT dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penentuan variabel dalam penilaian SWOT

Variabel ditentukan berdasarkan lingkup kajian yang diidentifikasi yang juga merupakan masukan (*input*) dalam proses Analisis SWOT. Penentuan variabel dalam penilaian SWOT dilakukan sesuai dengan cakupan bidang penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus kajian.

2. Perumusan parameter berdasarkan variabel penilaian SWOT

Setelah variabel dalam penilaian SWOT dirumuskan, maka akan dilanjutkan dengan proses perumusan parameter terhadap masing-masing variabel yang akan dijadikan acuan dalam penilaian SWOT. Dari parameter-parameter inilah diidentifikasi kekuatan atau kelemahan maupun peluang atau ancaman.

3. Penilaian dan pengelompokan ke dalam komponen SWOT

Setelah variabel dan parameter dalam penilaian SWOT dirumuskan, maka akan dilanjutkan dengan proses penilaian masing-masing parameter berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi eksisting dari masing-masing variabel (lingkup kajian) yang telah distrukturkan menurut Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal.

4. Mengombinasikan hasil penilaian komponen SWOT

Kegiatan mengombinasikan hasil penilaian komponen SWOT merupakan langkah dalam merumuskan Isu-isu Strategis yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan arah (strategi) pembangunan daerah. Proses kombinasi masing-masing komponen SWOT akan dijabarkan melalui Matrik Kombinasi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5

Matrik Kombinasi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal

KOMPONEN SWOT		ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL	PELUANG	Strategi S-O	Strategi W-O
	ANCAMAN	Strategi S-T	Strategi W-T

3.5 Tahap penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana dimana kebijakan akan diturunkan dari strategi penanggulangan kemiskinan yang dihasilkan dalam analisis SWOT. Strategi yang dihasilkan dalam analisis SWOT terlebih dahulu akan dikelompokkan berdasarkan kategori arahan penanggulangan kemiskinan. Dari arah kebijakan yang dihasilkan kemudian akan disusun program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun ke depan yang diletakkan menurut prioritas atas dasar pertimbangan kebutuhan waktu pencapaian dan urutan kesinambungan program.

FAKTA DAN ANALISIS

4.1 Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah

Indikator kemiskinan yang digunakan dalam perhitungan kemiskinan oleh BPS, termasuk BPS Provinsi Banten antara lain:

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang masih dalam kategori kebutuhan primer, antara lain perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

2. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2100kcal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Untuk kebutuhan non-makanan antara lain perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Banten, Pemerintah Daerah telah membuat berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai program yang ada di dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Program-program tersebut menjadi program prioritas pada masing-masing bidang guna mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh setiap daerah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, setiap pemerintah daerah telah membuat berbagai kebijakan guna mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di

daerahnya. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Untuk menanggulangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten, pemerintah daerah Provinsi Banten telah membuat berbagai kebijakan guna penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh berbagai bidang dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2009-2014.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan klasik yang dihadapi oleh berbagai daerah, khususnya pada negara berkembang seperti di Indonesia. Di Indonesia tingkat kemiskinan dapat dikatakan relatif tinggi. Tingkat kemiskinan di Indonesia terbesar berada di daerah-daerah tertinggal seperti Provinsi Banten yang berada di Provinsi Banten.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten optimis bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten akan terus mengalami penurunan. Hal tersebut juga diperkuat oleh target tingkat kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yang menargetkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Banten sebesar <5% pada Tahun 2025. Target yang telah ditetapkan tersebut tentunya telah dipertimbangkan sebelumnya oleh berbagai pihak terkait dengan memperhatikan kondisi eksisting dan potensi daerah yang ada di Provinsi Banten.

Dengan demikian, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut dengan membuat dan menjalankan berbagai kebijakan dan program untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.

Tabel 6
Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Banten Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1	PDRB (adh. Konstan Th.2000)	Juta Rp	4,604,208	4,843,499	105.20	Tercapai
	PDRB (adh. Berlaku)	Juta Rp	10,022,417	11,335,143	113.10	Tercapai
2	PDRB per Kapita (adh.Konstan Th.2000)	Rp	3,389,680	3,801,891	112.16	Tercapai
	PDRB per Kapita (adh. Berlaku)	Rp	7,378,639	8,897,489	120.58	Tercapai
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.35	5.12	117.70	Tercapai
4	Indeks Pembangunan Manusia	%	68.54	68.68	100.20	Tercapai
5	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	35.39	24.64	69.62	Tercapai
6	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	150.60	157.66	104.69	Tidak Tercapai

Sumber: Data BPS diolah, 2017

7	Usia Harapan Hidup	Tahun	63.87	63.35	99.19	Tidak Tercapai
8	Angka Partisipasi Murni SD / MI	%	96.64	98.01	101.42	Tercapai
9	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	96.64	98.07	101.48	Tercapai
10	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	55.11	52.32	94.94	Tidak Tercapai

Target indikator kinerja makro Provinsi Banten pada tahun 2016 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah optimis bahwa target tersebut dapat tercapai. Hal ini mengingatkan pemerintah daerah Provinsi Banten telah membuat berbagai kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 guna mendukung terealisasinya target tersebut. Program dan Kebijakan tersebut disusun berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dari 10 (sepuluh) indikator makro ekonomi dan sosial yang dijadikan target pemerintah daerah Provinsi Banten, hanya 7 (tujuh) indikator makro ekonomi dan sosial yang tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Ketujuh indikator tersebut diantaranya yaitu : 1) PDRB (adh. Konstan Th. 2000) dan PDRB (adh. Berlaku), 2) PDRB per Kapita (adh.Konstan) dan PDRB per Kapita (adh. Berlaku), 3) Laju Petumbuhan Ekonomi , 4) Indeks Pembangunan Manusia, 5) Angka Kematian Bayi, 6) Angka Partisipasi Murni SD/MI, 7) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs. Sementara ketiga indikator yang tidak tercapai diantaranya yaitu: 1) Angka Kematian Ibu, 2) Usia Harapan Hidup (UHH), 3) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA.

4.2 Analisis SWOT

Dalam analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana untuk menggambarkan struktur kondisi Pengembangan investasi diuraikan ke dalam beberapa variabel kunci, indikator dan sub indikator yang disertai pembobotan sesuai dengan kepentingannya dalampenanggulangan kemiskinan. Disamping itu untuk menggambarkan kondisi eksisting dari setiap indikator dan sub indikator dilakukan rating berdasarkan data hasil survey dari setiap indikator yang digeneralisasi untuk mendapatkan gambaran kondisi eksisting setiap indikator. Penilaian rating menggunakan skala 5. sehingga nilai yang diperoleh diantara -2 dan 2.

Untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten. Dari beberapa varibel kunci, dalam analisis akan

dikelompokkan menjadi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.

1. Analisis lingkungan Internal (*Strategic Advantages Profile-SAP*) yang merupakan indikator-indikator yang dapat dikendalikan yang dapat dibagi menjadi faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (*Environmental Threat and Opportunity Profile-ETOP*), yang merupakan indikator-indikator yang tidak dapat dikendalikan yang dapat dibagi menjadi faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dan ancaman Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten.

4.3 Faktor-faktor yang menjadi kekuatan

Berdasarkan hasil analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, faktor-faktor yang menjadi kekuatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Dalam variabel Kunci Kelembagaan: Adanya rencana strategis; Pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan; Adanya lembaga TKPKD; Jumlah instansi terkait; Pelaksanaan perda.
2. Dalam variabel kunci Potensi penanggulangan Kemiskinan: Struktur mata pencaharian; Perkembangan UKM; Angka melek huruf; Rendahnya penderita penyakit kronis; Rendahnya penderita cacat; Kepemilikan rumah sendiri masyarakat miskin.
3. Dalam variabel kunci Dukungan Infrastruktur: Stabilitasnya harga energi; Ketersediaan Air bersih; Penanggulangan sampah.
4. Dalam Variabel Kunci Ketahanan Pangan: Pengendalian inflasi daerah; Jaringan distribusi pangan; Operasi pasar; Pertumbuhan produksi pangan; Pertumbuhan konsumsi pangan; Pengelolaan stok pangan.

Dari seluruh variabel yang menjadi kekuatan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, indikator yang menjadi kekuatan dominan dalam Penanggulangan Kemiskinan adalah adanya kelembagaan TKPKD, adanya instansi terkait TKPKD, perkembangan UKM, angka melek huruf, kepemilikan rumah sendiri, ketersediaan air bersih, pengendalian inflasi daerah, jaringan distribusi pangan, operasi pasar, pertumbuhan produksi pangan dan pertumbuhan konsumsi pangan. Sedangkan pengaruh indikator lainnya meskipun merupakan kekuatan tetapi menunjukkan angka yang relatif kecil.

4.4 Faktor-faktor yang menjadi kelemahan

Dari sejumlah variabel kunci yang diuraikan dalam sub variabel dan sejumlah indikator Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, faktor-faktor yang menjadi kelemahan adalah sebagai berikut :

1. Dalam variabel Kunci Kelembagaan: Koordinasi antarinstansi terkait TKPKD; Belum adanya perda penanggulangan kemiskinan.
2. Dalam variabel kunci Potensi Penanggulangan Kemiskinan: Tingkat Pengangguran yang tinggi; Rendahnya penciptaan lapangan kerja; Angka partisipasi sekolah; Tingkat pendidikan rata-rata; Angka kematian bayi; Jumlah tenaga medis dan para medis; Fasilitas pelayanan kesehatan; Kondisi fisik bangunan tempat tinggal; Kondisi Fungsi ruang tempat tinggal.
3. Dalam variabel kunci Dukungan Infrastruktur: Akses jalan ke tempat tinggal; Kondisi Infrastruktur Transportasi; Kondisi sarana angkutan; Pemenuhan energi listrik; Pemenuhan energi gas.
4. Dalam Variabel Kunci Ketahanan Pangan: Tidak ada indikator teridentifikasi kelemahan.

Dari seluruh variabel yang menjadi kelemahan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten,koordinasi antara lembaga terkait TKPKD,belum tersedia Perda kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, Angka Partisipasi sekolah, rata-rata tingkat pendidikan, jumlah tenaga medis dan paramedis, fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi fisik dan rung fungsi bangunan tempat tinggal, akses jalan ke tempat tinggal, infrastruktur transportasi, sarana angkutan, pemenuhan kebutuhan energi listrik,pemenuhan energi gas. Sedangkan variabel lainnya bukan merupakan indikator kelemahan dominan dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

4.5 Faktor-faktor yang menjadi peluang

1. Dalam variabel kunci Lingkungan Mikro: Pertumbuhan ekonomi provinsi; Pertumbuhan lapangan kerja tingkat provinsi; Inflasi daerah tingkat provinsi; Rencana strategis penanggulangan kemiskinan provinsi; Adanya TKPKD Provinsi.
2. Dalam variabel Kunci Lingkungan Makro: Rencana Strategis penanggulangan kemiskinan nasional; TKPK nasional; Lembaga Terkait TKPK; Koordinasi antar lembaga terkait TKPK; Pertumbuhan ekonomi; Pendapatan perkapita; Tingkat inflasi Nasional; Investasi nasional; Kebijakan moneter; Kebijakan perdagangan internasional; Kebijakan pengembangan wilayah; Perkembangan infrastruktur fisik; Infrastruktur energi; Infrastruktur teknologi informasi.

3. Dalam variabel Kunci Lingkungan Internasional: Pertumbuhan ekonomi internasional; Kebijakan ekonomi Internasional.

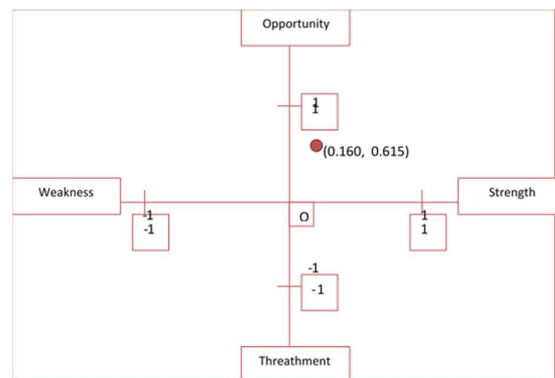
Dari seluruh variabel yang menjadi peluang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, pertumbuh ekonomi provinsi, pengendalian inflasi daerah provinsi, adanya TKPKD provinsi, adanya rencana strategis penanggulangan kemiskinan nasional, adanya lembaga terkait dan kordinasi TKPK nasional, kebijakan pengembangan wilayah, pengembangan infrastruktur fisik, energi dan teknologi informasi. Sedangkan pengaruh indikator lainnya meskipun merupakan peluang tetapi menunjukkan angka yang relatif kecil.

4.6 Faktor-faktor yang menjadi ancaman

Dari beberapa indikator lingkungan eksternal, faktor yang menjadi ancaman Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten adalah:

1. Dalam variabel kunci Lingkungan Mikro: Perkembangan Investasi; Koordinasi antar lembaga TKPKD.
2. Dalam variabel kunci Lingkungan Makro: Tingkat kemiskinan nasional; Kebijakan Fiskal.
3. Dalam variabel kunci Lingkungan Internasional: Stabilitas nilai tukar.

Dari seluruh variabel yang menjadi ancaman dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, lambatnya perkembangan investasi provinsi, koordinasi dalam TKPKD provinsi, tingkat kemiskinan nasional, kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar. Sedangkan pengaruh indikator lainnya meskipun merupakan ancaman tetapi menunjukkan angka yang relatif kecil.



Sumber: Hasil Analisis 2017

Gambar 2
Matriks SWOT

Matriks SWOT yang merupakan komposisi dari hasil analisis dan pendalaman faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, menunjukkan bahwa posisi Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten terletak pada Kuadran I. Pada posisi ini penanggulangan kemiskinan dihadapkan pada berbagai kekuatan dan peluang yang ada yaitu pada besaran kekuatan 0,160 dan peluang 0.615 pada skala 2.

Tabel 7
Matriks Silang SWOT

Sumber: Hasil Analisis 2017

	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
	1. Pertumbuhan ekonomi provinsi, pengendalian inflasi daerah provinsi, adanya TKPKD provinsi, adanya rencana strategis penanggulangan kemiskinan nasional, adanya lembaga terkait dan kordinasi TKPK nasional, kebijakan pengembangan wilayah, pengembangan infrastruktur fisik, energi dan teknologi informasi	Lambatnya perkembangan investasi provinsi, koordinasi dalam TKPKD provinsi, tingkat kemiskinan nasional, kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar
KEKUATAN (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T
3. Kelembagaan TKPKD, adanya instansi terkait TKPKD, perkembangan UKM, angka melek huruf, kepemilikan rumah sendiri masyarakat miskin, ketersediaan air bersih, pengendalian inflasi daerah, jaringan distribusi pangan, operasi pasar, pertumbuhan produkipangan dan pertumbuhan konsumsi pangan	4. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 5. Penguatan kelembagaan TKPKD 6. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM 7. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar	Peningkatan daya saing investasi dan lapangan pekerjaan
KELEMAHAN (W)	STRATEGI W-O	STRATEGI W-T
9. koordianasi antara lembaga terkait TKPKD, belum tersedia Perda kemiskinan, pengangguran,	10. Pengembangan peraturan daerah sebagai payung hukum	Pengembangan pembangunan yang inklusif

penciptaan lapangan kerja, Angka Partisipasi sekolah, rata-rata tingkat pendidikan, jumlah tenaga medis dan paramedis, fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi fisik dan ruang fungsi bangunan tempat tinggal, akses jalan ke tempat tinggal, infrastruktur transportasi, sarana angkutan, pemenuhan kebutuhan energi listrik, pemenuhan energi gas	penanggulangan kemiskinan 11. Pengembangan Program perlindungan sosial 12. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 13. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM	
--	--	--

Optimalisasi penguatan aspek internal melalui peningkatan kekuatan pada aspek internal merupakan pilihan strategi yang paling mungkin bagi penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, dalam rangka meraih peluang dari lingkungan eksternal melalui pemanfaatan dan pengerahan kekuatan yang ada.

4.7 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten

Berdasarkan analisis penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, maka dapat dipetakan kekuatan dan kelemahan internal yang dominan dan peluang dan acaman yang dominan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangannya. Berdasarkan peta permasalahan hasil analisis SWOT, maka dapat dirumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, melalui matrik silang sebagai berikut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil fakta dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan maupun Program yang tertuang dalam rencana pembangunan Provinsi Banten dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan sudah cukup komprehensif.
2. Sebagian besar target capaian indikator makro Provinsi Banten telah tercapai adalah capaian PDRB ADHB maupun ADHK, PDRB per Kapita, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, angka kematian bayi, angka partisipasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan yang masih belum tercapai adalah angka kematian ibu, usia harapan hidup, dan angka partisipasi kasar sekolah menengah atas sederajat.

3. Kemudian diperlukan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Pengembangan peraturan daerah sebagai payung hukum penanggulangan kemiskinan; Pengembangan Program Perlindungan Sosial; Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM; Penguatan kelembagaan TKPKD; Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar; Peningkatan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja; dan Pengembangan pembangunan yang inklusif.

REFERENSI

- Achmadi. (2006). *Penyerahan Modal Untuk Pembangunan*. Surabaya : Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga
- Achmadi. (2006). *Poverty, Inequality and Development*. Surabaya : Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga
- Amartya Sen, Bloom dan Canning, 2001. *The Health and Poverty of Nations : From Theory to Practice, School of Public Health, Harvard University, Boston and Dept. of Economics*. Queens University, Belfast.
- Barker, F. S. (1995). *The South African Labour Market : Critical issues for Reconciliation 2nd edition*. Durban : Sigma Press
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2016). *Indikator Makro Provinsi Banten Semester I 2016*. Serang, Banten : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2016). *Statistik Daerah Provinsi Banten 2016*. Serang, Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2016). *Provinsi Banten Dalam Angka 2016*. Serang, Banten : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
- Bloom dan Canning. (2001). *The Health and Poverty of Nations : From Theory to Practice*. Boston : School of Public Health, Harvard University dan Belfast : Dept. of Economics, Queens University
- Jonadi, A. (2012). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, 1*(April), 140–164.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nazamuddin. (2009). *Atas Nama Kemiskinan*. Aceh : FE-Universitas Syiah Kuala
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries 1st edition*. New York: Oxford University Press
- Sharp, A.M., Register, C. A., Grimes, P. W., (2000). *Economics of Social Issues 14th edition*. New York: Irwin/Mc Graw-Hill

Todaro, M. P. and Smith. S, (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.